

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen- Terhadap makanan Akibat Label Yang Tidak Benar- atau Menyesatkan.....	145
a. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan – Informasi yang benar.....	145
b. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan- lan Ganti rugi.....	146
c. Adanya hak konsumen untuk memperoleh- Penyelesaian sengketa akibat makanan dengan – Label yang tidak benar atau menyesatkan.....	161
d. Peranan pemerintah dalam melindungi konsumen..	168
3. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian – yang dialami oleh konsumen akibat label makanan- yang tidak benar atau menyesatkan.....	170

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	187
B. Saran	189

DAFTAR PUSTAKA.....	191
---------------------	-----

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



ABSTRAK

Pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar adalah hasil produksi industri kecil rumah tangga, sehingga diperlukan adanya upaya untuk menjaga mutu dan keamanan produk pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan produk pangan yang bermutu dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi objektif mengenai pangan yang dituangkan dalam label pangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria penulisan label, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat label makanan yang tidak benar atau menyesatkan.

Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang diambil adalah data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen label dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode pengumpulan data di tempuh dengan melakukan inventarisasi dokumen-dokumen label yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, menginventarisir dan menilai peraturan perundang-undangan yang terkait, menginventarisir dan menilai serta memilih secara selektif bahan –bahan bacaan lain. Metode analisis data yang dilakukan adalah kualitatif normatif. Data yang telah terkumpul di olah dengan mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Kemudian data dianalisis dengan di hubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan belum terwujud sebagaimana mestinya. Kenyataannya membuktikan bahwa informasi mengenai pangan yang dikonsumsi masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan justru menyesatkan, mengelabui dan membingungkan konsumen.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan labelisasi. Sistem Pertanggungjawaban yang dianut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan belumlah memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 angka 1 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Label, Tanggungjawab pelaku usaha.

ABSTRACT

Since most Indonesian food is produced by small-scale household industry, it is necessary to maintain the quality and safety of the food products. As qualified and health-meet requirements food demand is increasing, the necessary food point information is outlined in the food label.

The purpose of this study is to determine writing label criteria, forms of legal protection for consumers, and business responsibility for any losses suffered by consumers because of false or misleading food labels. The research's method is normative juridical approach. The types of data taken are secondary data consisting of label documents from Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method was by making an inventory of the label documents at Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, inventory and evaluate the related laws and regulations, inventory and evaluate and choose other reading materials selectively. Data analysis method is qualitative normative. Collected data was processed by implementing data by type based on the main issue. Afterwards, the data were analyzed by connecting with experts' thoughts and theories that support the argument, consequently we could make inductive conclusion from the certain matters to the general matters. The research resulted that legal protection for consumers under Undang-Undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan has not implemented, as it should. The fact proves the information on the food consumed is mostly unsuitable with the requirements and even mislead, deceive and confuse consumers.

The conclusion is that there are still business individuals violating the labelling regulation. The accountability system adopted Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan is not provide maximum protection to consumers yet. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen stated that businessmen are responsible to compensates damages or losses of pollution and/or consumers' losses from consuming goods and/or services produced or traded.

Keywords: Consumer protection, labels, business responsibilities.